

MASA ORDE BARU DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA TAHUN 1966-1977

THE NEW ORDER TIME AND ITS INFLUENCE ON THE LIFE OF THE INDONESIAN NATION 1966-1977

Yosima Halawa, Subaryana, Anggar Kaswati

IKIP PGRI Wates

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang latar belakang lahirnya orde baru, kebijakan pemerintahan orde baru dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Metode studi literatur dilaksanakan dengan cara mencari dan membaca buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun langkah yang dilakukan penulis adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan penulisan. Orde baru dimulai setelah keluarnya surat perintah sebelas maret dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto. Kerusuhan dalam hal demonstrasi terjadi karena Presiden Sukarno tidak mewujudkan permintaan rakyat. Permintaan rakyat disebut sebagai Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Setelah Jenderal Suharto menerima tugas mengamankan maka segera bertindak membubarkan PKI. Kebijakan untuk pembubaran PKI sebagai bagian permintaan rakyat. Kebijakan pemerintahan orde baru diwujudkan dengan melakukan stabilisasi politik serta stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan pemerintahan orde baru mempengaruhi segi kehidupan bangsa Indonesia. Presiden Suharto menjalankan kekuasaan secara otoriter. Kekuasaan presiden masa orde baru semakin kuat, didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintahan orde baru terwujud dengan berbagai perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum serta meningkatkan ketahanan dan keamanan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Orde Baru dan pengaruh bagi Bangsa Indonesia.

Abstract

The purpose of this paper is to find out about the background of the birth of the new order, the policies of the new order government and its influence on the life of the Indonesian people. The literature study method is carried out by searching and reading books that are relevant to the problems discussed. The steps taken by the author are topic selection, source collection, verification (source criticism), interpretation and writing. The new order began after the issuance of an order on March 11 from President Sukarno to General Suharto. The riots in terms of demonstrations occurred because President Sukarno did not fulfill the people's demands. The people's request is known as Tritura (Tri Demands of the People). After General Suharto accepted the task of securing it, he immediately took action to dissolve the PKI. The policy for the disbandment of the PKI was part of the people's request. The policies of the new order government were realized by carrying out political stabilization as well as economic stabilization and rehabilitation. The policies of the new order government influenced aspects of the life of the Indonesian people. President Suharto exercised power in an authoritarian manner. The power of the president during the new order was getting stronger, supported by the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI) and the entire Indonesian people. The policies of the new order government were manifested by various changes in the political, economic, social and cultural fields, law as well as increasing the resilience and security of the Indonesian nation.

Keywords: New Order and its influence on the Indonesian Nation.

Latar Belakang

Presiden Sukarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Presiden Sukarno belum maksimal didukung oleh seluruh masyarakat, terwujud dengan pemerintahannya yang tidak stabil pada akhir pemerintahan orde lama. Hal ini mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi, sehingga munculnya Tri Tuntutan Rakyat (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:406). Berbagai perbedaan tanggapan dalam masyarakat menimbulkan terjadinya pemberontakan yang mempengaruhi keamanan bangsa Indonesia. Pemberontakan dilakukan oleh organisasi yang didirikan dalam masyarakat.

Demonstrasi dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Demonstrasi bertujuan untuk menyampaikan inspirasi rakyat kepada pemerintah. Tuntutan rakyat tidak secara cepat direspon dengan tepat oleh pemerintahan, sehingga demonstrasi terus berlangsung. Adapun pertimbangan Presiden Sukarno dalam mengambil keputusan menjadi penyebab lama berhentinya demonstrasi. Presiden Sukarno tidak setuju dengan pembubaran PKI karena bertentangan terhadap doktrin Nasionalisme, Agama dan Komunisme (NASAKOM) yang telah direncanakan.

Jenderal Suharto memiliki keinginan yang berbeda dengan Presiden Sukarno. Dalam hal ini Jenderal Suharto menginginkan pembubaran PKI, dengan tujuan agar berhentinya pemberontakan dan adanya ketentraman dalam masyarakat. Peranan PKI terhadap peristiwa gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) sebagai sebab munculnya demonstrasi masyarakat yang menuntut pembubaran PKI (M. C. Ricklefs, 2001:586). PKI sebagai alasan memudarnya kepercayaan seluruh rakyat terhadap Presiden Sukarno.

Orde baru merupakan masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia. Orde baru dibedakan dengan orde lama setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Setelah Jenderal Suharto menerima surat perintah dari Presiden Sukarno maka Jenderal Suharto memiliki kewajiban untuk mengamankan bangsa Indonesia dengan mewujudkan tuntutan rakyat. Salah satu tuntutan rakyat yaitu pembubaran PKI yang terwujud sebagai kebijakan awal Jenderal Suharto.

Presiden Suharto melaksanakan kebijakan dengan menciptakan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Stabilisasi berlangsung dengan kebijakan terhadap

politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan terhadap perekonomian. Orde baru sebagai masa pembangunan bangsa Indonesia karena pada pemerintahan Presiden Suharto berhasil mewujudkan banyak pembangunan. Akan tetapi pada nyatanya pembangunan tidak merata diseluruh Indonesia, mayoritas pembangunan hanya ada di pulau Jawa. Bentuk pemerintahan orde baru bersifat otoriter yang nampak sejak awal pemerintahan Presiden Suharto. Oleh karena itu seluruh rakyat tidak sembarangan menuntut kebijakan pemerintahan. Adanya perubahan pemerintahan mempengaruhi kehidupan masyarakat karena kebijakan baru yang menata kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa yang berkaitan pada masa orde baru memberikan pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya serta ketahanan dan keamanan bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Pada penulisan ini peneliti menggunakan metode historis. Metode historis terdiri dari lima tahapan, tahapan yang pertama pemilihan topik, dalam pemilihan topic ini peneliti memilih topic disesuaikan dengan kedekatan emosional, setelah pemilihan topic tahap kedua ada pengumpulan sumber, pada penulisan sejarah sumber terdiri dari 2 bagian sumber primer dan sumber sekunder, setelah memperoleh sumber maka selanjutnya peneliti melakukan verifikasi sumber, untuk mengetahui apakah sumber tersebut sesuai dengan topic atau tidak. Setelah sumber tersebut diverifikasi selanjutnya peneliti melaksanakan interpretasi dan tahap yang terakhir penulisan sejarah (historiografi) (Kuntowijoyo, 2002: 64).

Hasil dan Pembahasan

A. Lahirmya Orde Baru

Aksi mahasiswa Indonesia mengutuk G30S/PKI dengan menyuarakan tri tuntutan rakyat. Lamanya respon Presiden Sukarno untuk mengambil tindakan yang tegas dalam hal membubarkan PKI menyebabkan munculnya aksi-aksi yang menuntut agar PKI segera dibubarkan. Kekompakkan mahasiswa terwujud dengan mendirikan golongan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tanggal 25 Oktober 1965. Adapun kesatuan lain, yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),

Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) (A.Y. Soegeng Ysh, 2002:220). Beberapa aksi tersebut sebagai wadah yang menentang G30S/PKI. Para aksi bertindak dengan cara melakukan demonstrasi. Sejalan dengan berlangsungnya demonstrasi, terjadi krisis dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Presiden Sukarno tampaknya memihak kepada PKI, karena kepentingan komunis internasional khususnya Republik Rakyat Cina (Baskara T. Wardaya, 2009:31). Oleh karena itu adanya tindakan Presiden Sukarno memberi komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk “Barisan Sukarno”. Tindakan tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan ajaran pemimpin besar revolusi. Akan tetapi para demonstran tidak memihak terhadap Barisan Sukarno, sehingga tindakan Presiden Sukarno dalam menyatukan Bangsa Indonesia belum terlaksana dengan solusi yang tepat.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) taat kepada panglima tertinggi ABRI, selain itu ABRI memelihara kekompakkan sesama ABRI dan kekompakkan ABRI dengan rakyat (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:408). Oleh karena itu ABRI bertindak sesuai dengan kesepakatan yang disepakatinya dan memiliki pertentangan dengan keinginan pemerintahan. Pemimpin ABRI memihak kepada para demonstran sedangkan pemerintah menganggap bahwa demonstran didalangi oleh Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim). ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura untuk dapat diteruskan. Oleh karena itu perbedaan sudut pandang dalam kebangsaan Indonesia menyebabkan pelaksanaan tindakan memulihkan keamanan tidak terselesaikan dengan cepat.

Pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan sidang paripurna, ketika sidang berlangsung Panglima Pasukan cakrabirawa bernama Brigjen Sabur melaporkan bahwa ada para pasukan yang tidak mengenakan identitas di luar Istana. Oleh karena itu Presiden Sukarno bersama dengan Waperdam I atas nama Dr. Subandrio dan Waperdam III yang bernama Dr. Chairul Saleh berangkat ke Bogor menggunakan helikopter. Sidang ditutup oleh Waperdam II yang bernama Dr. J. Leimena, kemudian menyusul Presiden Sukarno ke Bogor dengan menggunakan mobil (Taufik Adi Susilo, 2016:149). Keberangkatan Presiden Sukarno ke Bogor bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya

kejadian yang tidak diinginkan karena hadirnya para pasukan yang tidak dikenal tersebut.

ABRI khususnya TNI-AD meyakinkan Presiden Sukarno untuk tetap siap sedia menjaga keamanan. Akan tetapi kesediaan ABRI mengendalikan keamanan memiliki syarat khusus yaitu diperolehnya kepercayaan penuh dari Presiden Sukarno. Tiga Jenderal yang menghadap Presiden Sukarno di Bogor, yaitu Basuki Rachmat, M. Yusuf dan Amir Machmud (A.Y. Soengeng Ysh, 2002:79). Jenderal yang menghadap Presiden Sukarno sebagai utusan Jenderal Suharto. Pemimpin ABRI sebagai panutan seluruh ABRI khususnya TNI-AD adalah Jenderal Suharto. Munculnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 sebagai awal masa orde baru di Indonesia. Supersemar dibentuk dari berbagai kontroversi dan konsekuensi dengan tujuan untuk memulihkan keamanan bangsa Indonesia (Baskara T. Wardaya, 2009:32). Berdasarkan permintaan rakyat tentang pembubaran PKI, maka tindakan awal Jenderal Suharto adalah melaksanakan pembubaran PKI.

Pada sidang umum MPRS Presiden Sukarno sebagai Mandataris MPRS menyampaikan pidato (G. Moedjanto, 1988:148-149). MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Sukarno dalam melakukan kebijaksanaannya mengenai alasan muncul G30S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MPRS menginginkan agar dalam pidato Presiden Sukarno mencantumkan kebijakannya terhadap berbagai masalah yang terjadi. Akan tetapi Presiden Sukarno menyampaikan pidato dengan menegaskan amanat tentang perlawanan terhadap Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim), berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) serta Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan (Resopim) (A.Y. Soengeng Ysh, 2002:224). Pidato Presiden Sukarno disebut *Nawaksara*. Isi *nawaksara* tidak sesuai dengan permintaan MPRS.

Pada tanggal 7 Maret sampai 12 Maret 1967, berlangsung sidang MPRS di Jakarta (A.Y. Soengeng Ysh, 2002:82). Dalam sidang tersebut menyimpulkan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan, mandataris MPRS dari Presiden Sukarno dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden, hingga dipilihnya Presiden sebagai hasil pemilu. Pada tanggal 16 Agustus 1966, diadakan sidang Paripurna DPR-GR. Dalam sidang tersebut Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden mengucapkan

pidato yang berisi tentang langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan. Pemerintahan orde baru berbeda dengan pemerintahan orde lama, berbagai kebijakan pemerintahan orde baru mempertahankan kebangsaan Indonesia yang sebelumnya mengalami pemberontakan.

B. Pengaruh Kebijakan Orde Baru Terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia

Program pemerintahan diwujudkan dengan berbagai kebijakan mengatasi permasalahan dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, serta keamanan dan ketahanan. Stabilisasi politik adalah salah satu kebijakan pemerintahan orde baru melakukan keseimbangan dalam bidang politik. Kekuatan politik yang dicapai oleh pemerintahan orde baru menjadi ketetapan dalam menjalankan kekuasaan. Ketetapan pelaksanaan politik disesuaikan dengan keadaan berbangsa, sebagai kebijakan yang mampu mendukung kesejahteraan rakyat. Kekuasaan Presiden Suharto sebagai bentuk pemerintahan yang sentralisasi. Pemerintahan dijalankan dengan segala yang dinyatakan dari pusat dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah menjadi patokan utama dalam segala segi kehidupan masyarakat. Kekuatan pemerintahan orde baru didukung oleh interaksi politik luar negeri dan politik dalam negeri. Penerapan politik yang bebas aktif menimbulkan bangsa Indonesia menjalin interaksi baik dengan negara lain. Pemerintahan orde baru merealisasikan kebijakan dengan langkah utama kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengakhiri konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia (Zaim Saidi, 1998:70). Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di PBB sebagai organisasi dunia. Tindakan untuk menciptakan kedamaian dengan negara tetangga memberi pengaruh terhadap perkembangan kebijakan pemerintahan orde baru. Terjalannya hubungan baik Indonesia dengan negara lain sebagai pendukung untuk memperoleh modal asing dalam pembangunan nasional.

Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi adalah kebijakan pemerintahan orde baru melaksanakan kestabilan ekonomi dan memulihkan perekonomian dalam masyarakat. Stabilisasi ekonomi dilaksanakan dengan pengendalian inflasi agar harga kebutuhan tidak bertambah naik. Sementara rehabilitasi dilaksanakan dengan sarana yang ada sebelumnya, rehabilitasi ekspor dan rehabilitasi alat-alat produksi yang sebelumnya

mengalami kerusakan (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:430). Usaha pemerintahan melaksanakan penyelamatan ekonomi nasional dijalankannya program keuangan dengan penekanan inflasi dan peningkatan nilai rupiah. Oleh karena itu terwujudnya penyelamatan keuangan negara dan pengamanan terhadap kebutuhan pokok dalam masyarakat. Strategi pemerintah menjalankan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi sebagai dukungan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah orde baru menjalankan kebijakan di bidang ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintahan orde baru berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan terhadap seluruh masyarakat. Kebijakan Presiden Suharto sebagai wujud keadilan sosial dalam masyarakat. Pemerintahan berupaya untuk mengubah kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini dengan adanya tindakan pemerintahan terhadap pembangunan yang memiliki pengaruh penting terhadap sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan menjadi kesempatan bagi masyarakat karena adanya lapangan kerja. Pemerintahan memperluas lapangan kerja dengan meningkatkan mutu tenaga kerja. Pemerintahan orde baru berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Upaya pemerintahan meningkatkan pembangunan untuk keperluan masyarakat sehingga dapat dinikmati secara luas dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. kebijakan Presiden Suharto, misalnya usaha keterampilan melalui program pendidikan serta memperluas lowongan kerja sehingga banyak tenaga kerja yang terbebas dari pengangguran dalam masyarakat. Kemajuan dalam ilmu dan teknologi mempunyai keterkaitan dengan sosial dan budaya.

Pemerintahan orde baru menegakkan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan hukum. Pelaksanaan hukum diperkuat dengan tujuan agar bangsa Indonesia hidup dengan tertib dan damai. Negara Indonesia sebagai negara hukum (Redaksi Tangga Pustaka, 2009:3). Pelaksanaan hukum diwujudkan dengan berbagai tindakan yang dilarang. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan hukum dan pelaksanaannya dalam berbangsa memiliki pengaruh penting untuk terciptanya kesejahteraan.

Pada awal orde baru hukum memiliki pengaruh penting terhadap politik.

Pelaksanaan hukum politik ditunjukkan untuk menghilangkan pengaruh Demokrasi Terpimpin, sehingga adanya perubahan aturan daripada sebelumnya. Hukum diwujudkan dalam masyarakat luas untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto. Oleh karena itu pemerintahan orde baru dapat memulihkan ketertiban dalam masyarakat.

Pemerintahan orde baru memanfaatkan keberadaan Pancasila untuk mempersatukan seluruh rakyat dan sebagai mendukung kebijakan pemerintahan. Adanya penerapan asas tunggal khususnya Pancasila untuk mewujudkan persatuan nasional. Stabilisasi penyeragaman upaya penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen dilakukan dengan penerapan asas tunggal. Adanya tindakan Presiden Suharto untuk menyeragamkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diringkas dengan P4. Pemerintahan memiliki tujuan agar adanya pemahaman yang sama dalam berbangsa melalui penerapan P4. Setelah P4 disahkan maka pemerintah membentuk pelatihan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dengan mengikuti aturan hukum yang telah ditentukan.

Pelaksanaan P4 dan bimbingan pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan persatuan nasional. Tata urutan hukum yang berdasarkan dengan Pancasila sebagai sumber hukum, kemudian muncul hukum lainnya, misalnya proklamasi 17 Agustus 1945, dekrit Presiden 5 Juli 1945, UUD 1945 dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Darji Darmodiharjo, dkk, 1991:84). Hukum yang ditentukan sebagai sumber berbagai aturan dalam kehidupan bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup seluruh masyarakat. Adanya hukum dapat menentukan sikap dan tingkah laku yang layak dilakukan. Oleh karena itu hukum menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

Pelaksanaan pertahanan dan keamanan dilakukan oleh pemerintahan orde baru sebagai bagian usaha pembangunan nasional. Adanya kesadaran bahwa tugas pertahanan adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Oleh karena itu seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menjaga kebersamaan dan keamanan. Pemerintah menegakkan keamanan dalam masyarakat dan menegakkan perdamaian dengan negara tetangga. Oleh karena itu pemerintahan orde baru melaksanakan politik luar negeri yang bebas, aktif dan memfokuskan pada kepentingan nasional. Kebijakan terhadap interaksi internasional disesuaikan dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 (Marwati Djoened

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:475). Keikutsertaan dalam interaksi dengan negara lain memiliki manfaat untuk terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan keamanan. Oleh karena itu bangsa Indonesia bebas dari ketidakadilan atau bentuk penindasan dari negara-negara lain. Pemerintahan melahirkan pasca pengambilan kekuasaan dengan model yang otoriter. Oleh karena itu, para pemimpin memiliki ketergantungan dengan birokrasi dalam hal melaksanakan kebijakan terhadap seluruh masyarakat, demikian juga para militer dalam mempertahankan keamanan nasional (Iswandi, 1998:119). Kebijakan pemerintahan yang dijalankan dengan otoriter membuat seluruh masyarakat tutup mulut dan tidak berani bertindak untuk hal yang bertentangan dengan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan Presiden Suharto yang didukung oleh para militer mampu menciptakan keamanan dan ketahanan yang lebih terjamin dalam masyarakat. Kelembagaan negara menjalankan tugasnya dengan pengawasan pemerintahan, sehingga mampu mengurangi terjadinya ancaman keamanan yang muncul dari pihak manapun. Oleh karena itu pada awal orde baru pemerintahan dijalankan dengan lancar yang pengawasan difokuskan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan doktrin pertahanan dan keamanan nasional, maka diciptakan sistem pertahanan rakyat semesta yang mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional. Adanya usaha bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional aman dan tertib (Darji Darmodiharjo, dkk, 1991:90). Pemerintahan melakukan kebijakan terhadap para tokoh yang terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI, sebagai wujud kepedulian pemerintahan terhadap keamanan pada awal orde baru. Pemerintahan orde baru yang otoriter memiliki pengaruh penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan dalam masyarakat. Seluruh masyarakat perlu ikut serta untuk mendukung kebijakan pemerintahan. Pemerintahan mewujudkan pembangunan demi meningkatkan kebutuhan seluruh masyarakat. Adanya aturan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keamanan. Tindakan pemerintahan yang bersifat otoriter diawasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga lembaga pemerintahan tidak melakukan keinginan dengan sewenang-wenang terhadap seluruh masyarakat. Aturan yang berlaku dapat mewujudkan keamanan dan ketahanan negara.

Simpulan

Orde baru merupakan masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia. Lahirnya orde baru dipengaruhi oleh tuntutan rakyat terhadap pemerintahan yang memuncak dengan terjadinya demonstrasi. Adanya tuntutan rakyat menimbulkan munculnya keputusan Presiden Sukarno untuk memberi perintah kepada Jenderal Suharto sebagai tugas mengamankan. Oleh karena itu munculnya pemimpin baru yaitu Pejabat Presiden Suharto yang menciptakan berbagai perubahan terhadap bangsa Indonesia. Pejabat Presiden Suharto mampu menarik perhatian seluruh rakyat, sehingga memanfaatkan partisipasi rakyat sebagai dukungan untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan bidang ekonomi memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintahan mampu menciptakan interaksi sosial yang baik dengan sesama, adanya keamanan dan ketahanan negara Indonesia. Stabilisasi politik terwujud dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Presiden Suharto menjalankan kekuasaan secara otoriter. Kekuatan pemerintahan didukung oleh paramiliter demi menjaga ketahanan dan keamanan bangsa Indonesia.

Kebijakan pemerintahan orde baru mempengaruhi bidang politik dengan mengutamakan kepentingan nasional dan menata susunan pemerintahan yang lebih stabil daripada pemerintahan sebelumnya. Pada masa orde baru dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebebasan suara masyarakat dalam pemerintahan. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengendalian ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Kebijakan dalam hal penetapan dan pelaksanaan hukum sehingga terciptanya kedamaian. Pemerintah menegakkan keamanan dalam masyarakat dan menegakkan perdamaian dengan negara tetangga. Oleh karena itu pertahanan dan keamanan sebagai bagian usaha pembangunan nasional. Adanya kesadaran bahwa tugas pertahanan adalah hak dan kewajiban seluruh warga Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

A.Y. Soegeng Ysh. 2002. *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia*. Salatiga : Widya Sari

Press Salatiga.

Darji Darmodiharjo, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. (cetakan ke-10). Surabaya : Usaha Nasional.

Iswandi. 1998. *Bisnis Militer Orde Baru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Cetakan ke-8. Jakarta : Balai Pustaka.

Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 II*. Yogyakarta : Kanisius.

Redaksi Tangga Pustaka. 2009. *UUD 45 & Perubahannya*. Jakarta : PT. Tangga Pustaka.

Taufik Adi Susilo. 2016. *Soekarno : Biografi Singkat 1901-1970*. Yogyakarta : Garasi.

Wardaya, Baskara T. 2009. *Membongkar Supersemar Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*. Yogyakarta : Galangpress.

Zaim Saidi. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari : Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca-1980*. Bandung : Mizan.